

Reformasi Pemikiran dan Praktik Pendidikan Islam: Analisis Komparatif atas Gagasan Muhammad Qasim Zaman di Timur Tengah dan Asia Selatan

Hasnil Oktavera¹, Hasnul Arif², Julisrianto³, M. Fauzan Zenrif⁴

^{1,4} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia.

^{2,3} Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia.

Article history:

Received : 28-01-2025

Accepted : 19-05-2025

Published :30-06-2025

Author's email:

hasniloktavera22@gmail.com

Abstract

*This article explores the reform of Islamic educational thought and practice through a comparative analysis of Muhammad Qasim Zaman's perspectives on the Middle East and South Asia. The method used in this research is qualitative, using content analysis techniques on Zaman's book, *Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism*, as well as Zaman's other books and writings. The analysis focuses on how religious authority, the role of clerics, and political engagement affect Islamic educational institutions and discourses. The findings show that Zaman presents a critical reflection on the intersection between tradition and modernity in both regions, demonstrating how educational reforms were shaped by debates between traditionalist and modernist currents. These dynamics contributed to the formation of new educational models-such as reformed madrasas and integrated universities-that sought to integrate classical Islamic knowledge with modern sciences. This study highlights Zaman's contribution to understanding the trajectory of Islamic education reform in different socio-political contexts.*

Keywords: *Reform of thought; Reform of practice; Islamic education; Muhammad Qasim Zaman.*

Pendahuluan

Pemikir dan cendekiawan Pakistan-Amerika, Muhammad Qasim Zaman merupakan salah satu kontributor dalam diskusi reformasi pemikiran Islam modern di era radikal abad ke-21. Pemikiran-pemikirannya tertuang dalam tulisan-tulisannya tentang hubungan antara institusi agama dan politik Islam abad pertengahan dan modern, sehingga Zaman dalam membandingkan hubungan tersebut memunculkan perdebatan-perdebatan pemikiran Islam tradisional dan modern di Timur Tengah dan Asia Selatan.

Ide dan pemikiran Zaman muncul dari keprihatinannya terhadap kiris yang terjadi pada masyarakat Muslim pada aspek agama, ulama dan politik yang tidak sejalan antara pemikiran kaum Muslim tradisional dengan kaum Muslim modernis. Oleh karena itu,

dengan menggunakan pendekatan kawasan, Zaman terlebih dahulu melakukan kajian terhadap pembaharuan pemikiran Islam secara komprehensif, yang dinilai mampu menjembatani stagnasi pemikiran Islam klasik ke pemikiran Islam modern. Zaman juga menilai bahwa pemikiran Islam modern tersebut juga tidak hanya fokus pada persoalan penafsiran isi al-Qur'an yang etis dan legal, namun juga praktik masyarakat Muslim khususnya di bidang pendidikan. Pendekatan kawasan yang dilakukan Zaman ini berbeda dengan pendekatan kawasan yang digunakan Fazlur Rahman.

Dalam pandangan Rahman (Rahman, 1982, p. 43), ada empat perbedaan mendasar dalam karakter perkembangan modern di berbagai wilayah Muslim, yaitu (1) Wilayah yang mempertahankan budaya dan kedaulatannya dalam menghadapi ekspansi politik dan dominasi pemerintahan Eropa, (2) Sifat organisasi para ulama, dan sifat hubungan mereka dengan lembaga-lembaga pemerintahan sebelum kolonialisme, (3) Keadaan perkembangan pendidikan Islam dan kebudayaan yang menyertainya sebelum kolonialisme; dan (4) Karakter kebijakan kolonial secara keseluruhan dari negara penjajah tertentu, antara lain Inggris, Prancis dan Belanda.

Timur Tengah dan Asia Selatan merupakan dua wilayah vital Muslim yang sebagian besar negaranya berada di bawah pengaruh kolonialisme Eropa (Barat). Sehingga corak pendidikan Islam kolonial Inggris, Belanda dan Prancis berbeda. Ada yang bercorak ala asimilasi kolonialisme dan ada yang bercorak original-bebas. Diantara Negara di Timur Tengah yang berada di bawah ekspansi Prancis adalah Arab dan Mesir yang corak pendidikan Islamnya di bawah pengaruh kebudayaan Prancis. Sedangkan di Asia Selatan yang berada dibawah jajahan Inggris adalah India, dan Belanda mengekspansi Asia Tenggara yang salah satu negara jajahannya adalah Indonesia. Sehingga pendidikan Islam di bawah jajahan Belanda dan Inggris bercorak original-bebas tanpa ada asimilasi budaya yang mempengaruhinya.

Artikel ini mengulas tentang perdebatan mengenai pembaharuan dan reformasi pemikiran pendidikan Islam sehingga terjadi modernisasi pemikiran pendidikan Islam di kawasan Arab Timur Tengah dan India di Asia Selatan. Dalam mengulas hal tersebut, penulis menggunakan pendekatan komparatif terhadap tiga hal, yaitu: (a) karakter organisasi ulama, (b) kondisi dogmatisasi agama dan budaya (Islam), dan (c) kontestasi politik islam. Dari dua karakter tersebut penulis memunculkan berbagai tokoh dan argumen debatnya sesuai yang dipaparkan oleh Zaman, di antaranya adalah Rasid Ridha, Yusuf Qardawi, dan Ubaid Allah Shindi.

Para tokoh yang membicarakan gagasannya terhadap perkembangan pemikiran pendidikan Islam modern. Diantaranya adalah Muhammad Iqbal (Iqbal, 2011), Fazlur Rahman (Rahman, 1982), Harun Nasution (Nasution, 1982, p. 208), Muhammad Nuqaiib Al-Attas (Al-Attas, 1980), Mustafa Akyol (Akyol, 2021) dan Seyyed Hossein Nasr (Nasr, 2010). Mereka berpendapat bahwa pemikiran Islam dan hubungannya dengan modernitas perlu diperbaharui, terbuka dan toleran tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang murni. Hal ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang dalam menjembatani syariat Islam dengan negara sekuler yang hidup di dalamnya masyarakat Muslim modern. Selain itu Albert Hourani (Hourani, 1983), Malcolm Kerr (Kerr, 1966), dan Aziz Ahmad (Ahmad, 1967) memandang bahwa pemikiran Islam modern merupakan penelitian yang berusaha merevisi atau mengadaptasi institusi, kebiasaan, dan wacana Islam dalam konteks yang sesuai dengan agama. Menyoroti apa yang mereka anggap sebagai Islam yang sejati dibandingkan dengan bagaimana tradisi Islam telah berkembang dalam sejarah, dan bagaimana mereka melihat tantangan dan peluang modernitas.

Pada konteks otoritas agama tradisional dan agama modern, keduanya dapat tumbuh dan berkembang secara berdampingan dengan pemikiran modern (Said, 2012). Namun, secara kritik internal terdapat pengaruh agama-agama baru terhadap pandangan tradisional tentang otoritas agama (Sutton, 1983), terutama pandangan tentang kewarganegaraan, sekularisasi (Turner, 2011), dan hak asasi manusia (Banchoff & Wuthnow, 2011). Akibat dari pengaruh tersebut terjadi pergeseran otoritas agama tradisional (Juergensmeyer, 2005) dan otoritas agama modern (Bruce, 1996), baik pemikiran maupun praktik (Kuhn, 2020).

Oleh karena itu, otoritas agama tradisional dan otoritas agama modern dalam masalah pemikiran dan praktik pada negara sekuler (Khan, 2012) dimungkinkan untuk dirumuskan kembali (Hallaq, 2019). Sebab, tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat Muslim modern adalah interaksi timbal balik antara pemikiran dan praktik (Allawi, 2009). Hal ini perlu dilakukan dalam rangka menjembatani praktik dan pemikiran Islam dalam konteks nasionalisme dan fundamentalisme (Moaddel, 2005), sehingga nilai-nilai tradisionalisme dapat dipertahankan pada era Islam modern (Nasr, 2009, 2010).

Dalam dunia Islam modern muncul berbagai macam aliran dibalik gerakan politik Islam, terutama gerakan radikalisme dan gerakan ekstremisme yang memberikan dampak dalam dunia Islam modern seperti jihadis dan ISIS (Kepel, 2002). Gerakan

jihadis (Khosrokhavar, 2015) dan ISIS (McCants, 2015) merupakan gerakan yang telah menyebarkan ideologi radikal (Brachman, 2008) dan ekstrim di India, Bangladesh dan di Negara-Negara Teluk (Berger, 2005). Aliran-aliran tersebut dapat diredam dengan berbagai strategi (Aldis & Herd, 2006), seperti memahami faktor proses masuk dan keluarnya seseorang dari kelompok ekstremisme tersebut (Nawaz, 2012).

Ulama dan cendekiawan Islam memiliki peran penting dalam membendung gerakan ideologi radikal dan ekstrim (Al-Azmeh, 2009), termasuk demokrasi dan hak asasi manusia (Abou El Fadl, 2004), hubungan strategis-historis Barat dan masyarakat Muslim (Al-Rodhan, 2012). Selain itu ulama dan cendekiawan Muslim mesti berupaya membentuk gagasan dan cara pandang dinamika sosial politik (Aydin, 2017), serta berperan sebagai aktor dalam dinamika sosial politik tersebut (Tibi, 2014). Peran sentral ulama dan cendekiawan Muslim tersebut penting sebagai pemegang otoritas pembentukan hukum Islam (*shari'a*) dan masa depannya dalam tatanan politik sekuler masyarakat modern (Khan, 2012).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) (Catalano & Waugh, 2020) dalam menggali pemikiran Muhammad Qasim Zaman yang termuat dalam karya utamanya yaitu *“Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism*. Analisis konten ini dipilih karena relevan untuk menelaah wacana, gagasan, dan hubungan antar konsep dalam teks. Dalam konteks penelitian ini, penulis fokus pada isu agama, ulama dan politik dalam konteks pendidikan Islam modern di era radikal abad 21 dengan menilai sisi kesamaan, perbedaan serta pengaruhnya dalam praktik pendidikan Islam.

Konteks agama yang penulis bandingkan adalah berbagai dogma-dogma dan ajaran-ajaran yang berkembang di kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah, sedangkan Ulama yang penulis maksud adalah pemikiran tokoh-tokoh penting seperti Rashid Ridha, Yusuf al-Qardawi, dan para ulama dari tradisi Deobandi. Konteks politik yang penulis maksud adalah dinamika sosial-politik. Penelitian ini juga bersifat studi kawasan (Ahram et al., 2018) yang mengkaji bagaimana pemikiran pendidikan Islam berkembang di dua wilayah utama komunitas Muslim, yaitu Timur Tengah dan Asia Selatan.

Penulis menggunakan kerangka analisis tematik Fazlur Rahman sebagai prosedur penelitian yang disandarkan pada dua gerakan hermeneutik, (Akbar, 2020; Rahman, 1982, pp. 5–10) yaitu: (1) Analisis kritis terhadap tradisi dan teks keagamaan. Dalam konteks

ini, penulis mengkaji hubungan antara *maslaha* dan ijtihad terhadap pendidikan Islam modern. (2) Menyesuaikan interpretasi hasil analisis ke dalam konteks sosial modern. Dalam hal ini penulis berusaha menginterpretasikan integrasi pendidikan agama dan sekuleritas.

Tabel 1. Prosedur Penelitian yang digunakan dalam analisis wacana kritis

Kerangka Analisis	Unsur Analisis	Penjelasan
Analisis kritis terhadap tradisi dan teks keagamaan	Identifikasi utama	Karena secara eksplisit membahas otoritas keagamaan dan kritik internal terhadap tradisi Islam, buku Zaman yang berjudul “ <i>Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism</i> ” dijadikan sebagai sumber utama.
	Koding tematik	Kategori utama berasal dari bidang agama, ulama, dan politik, sehingga unsur-unsur ini berfungsi sebagai dasar untuk menandai tema, argumen, dan konteks yang relevan dalam teks.
Interpretasi hasil analisis de konteks sosial modern	Komparasi kontekstual	Untuk mengidentifikasi perbedaan dan hubungan antara gagasan, setiap tema dikaji dari perspektif Asia Selatan dan Timur Tengah.
	Interpretasi wacana	Hasil perbandingan ditafsirkan dalam konteks reformasi pendidikan Islam, khususnya bagaimana perspektif Zaman merefleksikan tantangan dan solusi pendidikan di dunia Islam saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Muhammad Qasim Zaman

Muhammad Qasim Zaman lahir pada tanggal 17 Januari 1955 di Lahore, Pakistan, yang terkenal dengan pendidikan Islam. Dia belajar di lembaga pendidikan Islam terkenal di Pakistan, Darul Uloom Karachi. Dia memperoleh gelar Sarjana bidang Sejarah dan Filsafat dari Universitas Punjab di Lahore, Pakistan, dan gelar Master dan Doktor dalam bidang Sejarah dan Politik Internasional di University of Cambridge, Inggris. Sekarang, dia adalah Profesor Studi Timur Dekat dan Agama di University of Princeton semenjak 2006. Karya tulisnya banyak menyoroti tentang hubungan antara institusi agama dan politik Islam abad pertengahan dan modern, pemikiran sosial dan hukum di dunia Muslim modern, institusi dan tradisi pembelajaran Islam, dan aliran ide antara Asia Selatan dan Timur Tengah Arab. Buku yang ditulis olehnya antara lain: “*Religion and Politics under the Early Abbasids*” (Zaman, 1997), “*The Ulama in*

Contemporary Islam: Custodians of Change” (Zaman, 2010), “Ashraf Ali Thanawi: Islam in Modern South Asia” (Zaman, 2012a), “Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism” (Zaman, 2012b), dan “Islam in Pakistan: A History (Zaman, 2018). Dia juga merupakan salah satu editor beberapa buku, termasuk “Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education” (Hefner & Zaman, 2010) bersama Robert W. Hefner, “Princeton Readings in Islamist Thought” (2009) (Euben & Zaman, 2011) bersama Roxanne L. Euben, dan “The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought” (2012) (Bowering et al., 2012) yang ditulis oleh Gerhard Bowering dkk. Dan saat ini, dia sedang mengerjakan sebuah buku tentang Asia Selatan dan dunia Muslim yang lebih luas pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas.

Diantara karya Zaman yang monumental adalah buku “*Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism*”. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012 di Cambridge University Press dengan 363 halaman. Buku ini dibagi ke dalam Sembilan pembahasan, dan menurut penulis reformasi pemikiran pendidikan Islam merupakan topik yang hangat untuk dibahas dalam buku tersebut.

Buku ini muncul dari adanya keprihatinan Zaman terhadap krisis yang menimpa Islam dan masyarakat Muslim (Zaman, 2012b, p. 1). Diantara krisis tersebut adalah norma, institusi dan praktik sehingga perlu di reformasi. Selain itu atas otoritas apa reformasi itu dilakukan (Zaman, 2012b, p. 1). Dalam membedah pemikiran Zaman ini, Voll (Voll, 2014) telah melakukan rewiu dengan melihat lebih tajam pada aspek keadilan sosial ekonomi. Sedangkan Moosa (Moosa, 2015) dari hasil rewiunya mengemukakan bahwa aspek sosiologi pengetahuan tidak hanya akan membantu kita untuk memahami tradisi ulama dalam kompleksitas yang lebih besar, namun kita juga ditantang untuk memahami berbagai jenis wacana bernalar (logoi) yang membentuk dan menentukan wacana ulama.

Kerangka kajian (*Framework*) yang di bangun oleh Zaman dalam mengungkapkan pemikiran Islam modern dalam mereformasi pendidikan Islam melalui pendekatan komparatif (Zaman, 2012b, p. 39). Gagasan mengenai *maslaha*, kebaikan bersama, dan ijtihad dalam bingkai pendidikan dalam masyarakat Muslim belum pernah dipertimbangkan bersama-sama dalam kerangka perbandingan. Tema-tema tersebut dibahas oleh Rashid Ridha dan Qardawi dimana keduanya belum pernah diteliti secara bersama-sama baik oleh mereka yang menulis tentang Ridha maupun oleh para kajian Qardawi yang tentunya merujuk pada kasus-kasus kelompok Deobandi di Asia Selatan

(Zaman, 2012b, p. 40). Oleh karena itu, ada tiga langkah yang ditempuh oleh Zaman dalam studi komparatif ini, yaitu: Pertama, menilai dalam satu kerangka tunggal perkembangan intelektual dan keagamaan di dua wilayah utama dunia Muslim kontemporer: Timur Tengah Arab dan Asia Selatan. Kedua, menampilkan interaksi antara tokoh-tokoh kunci seperti Ridha dan Qardawi dengan sejumlah ulama Asia Selatan dan beberapa Deobandi. Ketiga, memberikan pencerahan baru mengenai pertanyaan tentang perkembangan hubungan antara dua orientasi yaitu Deobandi dan Salafi (Zaman, 2012b, pp. 40–41).

Agama dalam Pemikiran Pendidikan Islam Modern Timur Tengah dan Asia Selatan

Pemikiran Islam Modern merupakan pemikiran modernis yang berupaya memikirkan kembali atau mengadaptasi Islam secara normatif yang berbeda halnya perkembangan tradisi Islam secara kontekstual dalam sejarahnya dan bagaimana para pemikir Islam tersebut melihat tantangan dan peluang modernitas (Zaman, 2012b, p. 2). Perkembangan tradisi pemikiran dalam Islam secara kontekstual dengan tokohnya Rasid Ridha dan Muhammad Abduh (Zaman, 2012b, p. 4), Sayyid Ahmad (Zaman, 2012b, p. 5), Ubayd Allah Sindhi (Zaman, 2012b, p. 11). Sementara perkembangan tradisi pemikiran dalam Islam secara normatif diantara tokohnya adalah Anwarshah Kashmiri (w. 1933) (Zaman, 2012b, p. 25), Manazir Ahsan Gilani (w. 1956) (Zaman, 2012b, p. 25), Hifz al-Rahman Seoharwi (w. 1962) (Zaman, 2012b, p. 26), Muhammad Yusuf Banuri (w. 1977) (Zaman, 2012b, p. 27) dan Sa'id Ahmad Akbarabadi (w. 1985) (Zaman, 2012b, p. 28).

Zaman mengkaji perkembangan pemikiran Islam modern dengan fokus pada otoritas agama dan kritik internal yang memainkan peran penting dalam pemikiran Islam saat ini. Kritik internal dilayangkan pada otoritas keagamaan dan praktik, teks dan konteks yang berjalan beriringan, dan otoritas agama menjadi masalah kontestasi tiada henti (Zaman, 2012b, pp. 29–33). Bagi zaman, kritik internal dianggap penting dalam pemikiran Islam modern, karena merujuk pada proses kritik dan reformasi yang datang dari dalam dunia Islam itu sendiri serta datang dari ulama dan cendikiawan Muslim yang mencoba mengevaluasi dan menafsirkan kembali ajaran Islam dalam konteks era mereka. Sehingga kritik internal dianggap oleh Zaman sebagai upaya untuk memodernisasi Islam dan mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di era modern (Zaman, 2012b, p. 37), seperti ijtihad (*maslaha*) (Zaman, 2012b, pp. 75–107).

Sejalan dengan itu, pluralitas pemikiran dibutuhkan dalam menyoroti keragaman pemikiran dalam dunia Islam modern, sehingga dalam menggambarkan pemikiran Islam saat ini tidak bisa menggunakan satu pendekatan tunggal, akan tetapi menggunakan berbagai pandangan mulai dari pandangan konservatif hingga yang progresif (Zaman, 2012b, p. 84). Pemikiran Islam modern juga memerlukan relevansi kekinian dalam mengatasi isu-isu penting yang berkembang pada masyarakat Muslim seperti demokrasi (Zaman, 2012b, p. 249), Hak Asasi Manusia (Zaman, 2012b, p. 297), peran perempuan dalam masyarakat serta hubungan Islam dan kebudayaan barat (Zaman, 2012b, pp. 176–220).

Cendekiawan Muslim berupaya menentukan cara yang sesuai dalam menggabungkan ajaran Islam dengan tantangan perubahan modern, termasuk hubungan antara agama dan negara (Zaman, 2012b, p. 242). Tradisi Islam dalam masyarakat Muslim termasuk di dalamnya para ulama dan intelektual Muslim telah meragukan dan melakukan pengkajian ulang pandangan tradisional mereka tentang agama sehingga relevan dengan perkembangan zaman. Pemikiran dan praktik Islam telah bergeser dari otoritas agama tradisional ke kontemporer, sehingga isu radikalisme terhadap ketidakpuasan sosial, politik dan ekonomi berkembang dan beberapa individu menerima pemikiran ini (Zaman, 2012b, pp. 261–306).

Zaman berpendapat bahwa pandangan radikalisme dan ekstremisme dalam Islam seringkali menyebabkan kekerasan, ketegangan dan konflik yang merugikan masyarakat Muslim dan non-Muslim, sehingga penting bagi komunitas Muslim untuk menghadapi dan menolak ideologi radikal melalui kritik terhadap radikalisme. Selain itu juga penting pemahaman dan pendidikan yang benar terhadap Islam dalam mencegah radikalisme.

Partisipasi dan keterlibatan politik dan demokrasi menurut Zaman merupakan cara untuk menanggapi isu-isu dalam masyarakat Muslim, sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih konstruktif dibandingkan kekerasan dan ekstremisme. Dialog dan keterbukaan antar agama dalam rangka membangun pemahaman akan perdamaian. Sosial ekonomi salah satu isu munculnya radikalisme dan ekstremisme dalam dunia Islam karena adanya ketidaksetaraan, ketidakadilan dan ketidakstabilan (Zaman, 2012b, pp. 221–260).

Sebagian Ulama dan cendekiawan Islam memiliki peran dalam memelihara tradisi agama dan memastikan ajaran Islam melalui teks-teks suci dapat dipahami dan dipraktikkan dengan benar oleh masyarakat Muslim (Zaman, 2012b, p. 262), dan sebagian yang lain berperan dalam mengembangkan pemikiran Islam terutama bidang

fiqih, terlibat dalam kegiatan amal, pendidikan, dan menangkal pemikiran ekstrim dan merumuskan argumen yang mendukung toleransi (Zaman, 2012b, pp. 90–91).

Ulama, Madrasah dan Kritik Internal: Upaya Menjembatani Antar Tradisi di Arab Timur Tengah dan Asia Selatan

Reformasi pendidikan merupakan isu sentral dalam memperbincangkan Islam dan modernitas. Karena reformasi pendidikan merupakan harus dirumuskan sehingga keberterimaannya oleh umat Islam dapat memenuhi tantangan perubahan zaman, kebutuhan dan berguna. Langkah penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah pemahaman ilmu-ilmu modern, sekuler, dan Barat diintegrasikan dengan ilmu-ilmu tradisional Islam. Dengan begitu, Islam ditafsir ulang untuk memfasilitasi adaptasi Muslim terhadap institusi dan praktik-praktik modern.

Reformasi pendidikan tersebut telah mendapatkan kritikan dari para modernis Muslim pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka dan elit pemerintahan yang sedang memodernisasi masyarakat Muslim pasca kolonial mendesak para ulama untuk menjadikan ilmu pengetahuan modern sebagai kekuatan yang hidup di kalangan Muslim dengan mendirikan madrasah dan lembaga pembelajaran Islam tradisional lainnya, yang oleh Barat sering dipandang sebagai tempat indoktrinasi tidak liberal.

Respon para ulama waktu itu bahwa kebajikan yang perlu dikembangkan oleh umat Islam berasal dari tradisi agama Islam itu sendiri dan bukan dari Barat. Upaya-upaya untuk mencampurkan ilmu-ilmu keIslaman dengan bentuk-bentuk pembelajaran modern Barat pada akhirnya bertujuan untuk melemahkan kemampuan para ulama dalam memberikan pembelajaran keIslaman yang otoritatif, dan dengan demikian merupakan serangan yang tersamar terhadap Islam itu sendiri. Dari pandangan ulama semacam ini membuat keraguan mendalam tentang arti madrasah dan konstruksi Islam bagi dunia di sekitarnya.

Namun, para ulama di zaman modern ini hampir tidak memiliki satu pemikiran tentang apakah atau bagaimana mempertahankan institusi mereka dan sampai sejauh mana mereka membuka diri terhadap bentuk-bentuk pembelajaran nontradisional. Banyak di antara mereka yang melihat upaya-upaya untuk mendekatkan ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu modern dan sekuler bukan sebagai sesuatu yang melemahkan Islam, melainkan sebagai kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup Islam di tengah-tengah modernitas. Melawan para pengkritik mereka yang lebih konservatif, mereka berargumen bahwa Islam tidak pernah menentang pemisahan yang tajam antara ilmu agama dan ilmu duniawi, bahwa kedua aliran tersebut harus terus saling mengisi satu

sama lain untuk memungkinkan umat Islam menjalani kehidupan yang sesuai dengan iman mereka dan juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan modern.

Politik, Pendidikan, dan Elit Baru: Upaya Reformasi Pendidikan Islam di Arab Timur Tengah dan Asia Selatan

Antara pendidikan, politik dan munculnya elit baru dalam pemikiran dan praktik pendidikan Islam modern adalah sebuah keniscayaan. Adanya tarik ulur reformasi pendidikan semestinya sejalan antar pemikiran ulama, pengembang lembaga pendidikan (reformis) dan pemerintah. Upaya timbal-balik antar unsur ini mesti dilakukan sehingga reformasi pendidikan Islam yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman bisa terwujud. Dalam mewujudkan hal itu, kritik internal dibutuhkan untuk melihat sisi kelemahan.

Hal ini berkaitan terhadap apa yang digambarkan oleh Zaman terhadap kasus yang terjadi di Al-Azhar, Kairo-Mesir. Terdapat upaya modernisasi pemikiran pendidikan Islam di Institusi tersebut antara Abduh, Khedive, Muhsin al-Mulk dan Ridha (Zaman, 2012b, pp. 143–175). Berawal dari pidato ketidak-terimaan Khedive ‘Abbas -seorang penguasa Mesir di bawah kekuasaan Utsmaniyah- mengancam reformasi administrasi dan praktik-praktik pendidikan di Al-Azhar oleh Abduh. Khedive menganggap reformasi tersebut telah merongrong mandat agama dari tempat pembelajaran Islam. Sehingga pada Maret 1905, Abduh mengundurkan diri dari komite yang dibentuk di dalam lembaga Al-Azhar itu. Reformasi pendidikan Abduh ditentang di kalangan cendekiawan konservatif Azhar, namun di sisi lain di luar Mesir, -seperti Muhsin al-Mulk dari India- merasa khawatir akan pudarnya perjuangan mereka melawan tradisi anakronistik. Muhsin al-Mulk memandang bahwa Al-Azhar akan memiliki otoritas pendidikan agama yang dianggap murni, otentik dan bermanfaat jika saja Al-Azhar di reformasi, namun Khedive menetapkan Al-Azhar harus melanjutkan cara-cara tradisionalnya seperti saat ini. Disisi lain, kritik yang dibangun oleh al-Mulk ini ambigu. Sebab upayanya mendirikan Aligarh sebagai lembaga reformasi pendidikan Islam menuai kegagalan. Dengan kegagalan itu memunculkan apa yang kita kenal sekarang dengan dikotomi keilmuan pada Dar al-Ulum di Deobandi.

Muhammad Rasyid Ridha muncul dengan gagasannya tentang arah baru pendidikan Islam. Ridha mengamati perdebatan ulama tradisionalis dengan ulama reformis dan menilai bahwa adanya kalkulasi politik dibalik mundurnya Abduh, sehingga ulama Al-Azhar yang sebagian besar awalnya mendukung pemikiran Abduh beralih ke

Khedive. Langkah Ridha selanjutnya adalah membangun Madrasah al-Da'wa wa al-Irsyad di Kairo.

Ridha menyerukan di sini tidak kurang dari jenis baru intelektual publik dan keagamaan, yang memiliki klaim kredibel terhadap otoritas keagamaan namun independen dari ulama tradisional. Visi ini mengantisipasi kaum Islamis yang berpendidikan Perguruan Tinggi pada generasi berikutnya. Sebaliknya, kaum elit di antara mereka akan dididik di sebuah institusi yang dirancang khusus untuk mereka, memperoleh semua yang mereka butuhkan untuk melakukan ijtihad, mengeluarkan fatwa, dan memberikan kepemimpinan agama dan politik kepada masyarakat luas. Sehingga pemerintah mujtahid yang unggul akan datang dari kalangan intelektual seperti itu. Jenis intelektual yang digambarkan oleh Ridha akan memainkan peran kunci dalam mengarahkan kembali Islam dan masyarakat Muslim ke arah kemandirian politik, persatuan agama, dan semangat intelektual. Mereka juga harus menjadi jembatan penghubung antara pengetahuan agama dan duniawi.

Seperti halnya Ridha, Muhammad Yusuf al-Qardawi juga memperjuangkan para intelektual religius yang menggabungkan bentuk-bentuk pengetahuan Islam dan modern. Qardawi memperkenalkan Sekolah Tinggi Studi Agama di Doha, Qatar yang dipimpinnya dari awal tahun 1960 hingga akhir tahun 1970. Di Sekolah ini, Qardawi telah mencoba mengembangkan sebuah sistem pendidikan yang memadukan keaslian tradisional dan kontemporer. Visi ini akan terus dia kawal hingga pada tahun 2007 mencapai puncak keemasannya yang mampu menaungi sejumlah institusi pendidikan. Dengan visi yang dijelankannya, maka Sekolah Tinggi tersebut menawarkan gelar kebijakan publik dalam Islam dan gelar hukum Islam kontemporer dalam bidang fikih. Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan lulusan yang secara intelektual, moral, dan teknis mampu mengaitkan warisan Islam dengan teks, metodologi, dan prinsip-prinsipnya dengan masalah-masalah dan tantangan modern serta solusinya.

Dari enam tokoh yang diungkapkan oleh Zaman, dapat ditangkap bahwa keberterimaan konsep reformasi pendidikan Islam tidak serta merta terwujud secara langsung, namun butuh proses dan kritik dari berbagai pihak. Ulama, pemerintah dan reformis harus saling bersinergi seperti apa yang di contohkan oleh Qardawi dalam membangun Perguruan Tinggi Islam di Qatar dan Al-Azhar di Mesir. Pemikiran genuine Qardawi yaitu: (a) usahanya untuk memperbaharui komitmen norma-norma Islam di kalangan umat Islam dan rasa identitas peradaban Muslim, (b) Globalisasi alternatif, yang tidak didominasi oleh neo-imperialis Barat dan di mana Islam dan kaum Muslimin

dapat memainkan peran kepemimpinan yang seharusnya menjadi milik mereka, (c) Menjembatani pendidikan agama dan duniawi merupakan cara tepat untuk mempersiapkan umat Islam menghadapi modernisme.

Selain rumusan masalah yang bersifat teoritis, poin penting lainnya adalah praktik pemikiran Islam modern. Praktik pemikiran Islam modern bermula dari pembentukan pengetahuan dan tradisi-tradisi pengetahuan seperti di Deobandi dan madrasah-madrasah lainnya, terutama di Asia Selatan dan Timur Tengah. Deobandi merupakan salah satu gambaran umum tumbuh dan berkembangnya ulama yang bermazhab Sunni yang berdiri pada tahun 1866. Sehingga Deobandi dikenal sebagai madrasah yang melahirkan ulama-ulama yang mempertahankan tradisi dan secara gencar mengkritik praktik pemikiran Islam modern yang menurut mereka berseberangan dengan tradisi Islam. Meskipun begitu, keberadaan Deobandi tetap menempati posisi penting dalam perdebatan modernisasi pemikiran pendidikan Islam.

Pada kasus Deobandi, Zaman mengungkapkan para cendekiawan yang berpendidikan tradisional memandang hubungan dikotomi antara tradisi intelektual yang saling bersaing, diantaranya `Ubayd Allah Sindhi, Manazir Ahsan Gilani, Sayyid Salman Nadwi, dan Zahid al-Rashidi (Zaman, 2012b, pp. 160–167). `Ubayd Allah Sindhi merupakan cendekiawan yang sangat kritis terhadap jenis pembelajaran yang diberikan di lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang di Deobandi. Kritik Shindi terhadap pendidikan madrasah kontemporer sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Rashid Ridha. Shindi mempertanyakan bagaimana seharusnya kita mempelajari al-Qur'an?, dan bagaimana mungkin kita dapat mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka yang bahkan bukan Muslim, sedangkan kita belum memahami sepenuhnya?. Hasil dari kritiknya, Shindi mendirikan madrasah Nizarat al-Ma`arif di Delhi yang mengajarkan Al-Qur'an pada lulusan Aligarh dan Deoband. Pada akhirnya Shindi mengakui tentang perlunya umat Islam belajar bahasa Inggris dan ilmu-ilmu Barat untuk lebih memahami perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Eropa kontemporer.

Selain Shindi, kritikus internal lainnya adalah Manazir Ahsan Gilani (Zaman, 2012b, p. 160). Gilani merupakan pengajar di madrasah Deoband dan di Fakultas Teologi Universitas Osmania di Hyderabad. Universitas Osmania ini didirikan agar ilmu yang bersifat tradisional dan kontemporer, seni dan ilmu pengetahuan Timur dan Barat dipertemukan sedemikian rupa. Meskipun pada akhirnya Universitas Osmania ini tidak lebih berhasil dalam mengintegrasikan tradisional dan kontemporer dibanding Aligarh. Pemikiran genuine Gilani adalah reformasi pendidikan Muslim di India kontemporer.

Gilani menunjukkan bahwa inti dari pendidikan Muslim di India pra-kolonial terdiri dari sebuah badan yang sangat kecil dan stabil dari teks-teks keagamaan, seperti *Mishkât al-masâbih*, *Hidâya*, dan Tafsir Jalalain (SAIF, 2015). Gilani berpandangan bahwa sebenarnya tidak ada yang sakral yang diajarkan di madrasah. Selama teks-teks kunci tertentu dipertahankan, teks-teks dan disiplin ilmu lain dapat ditiadakan untuk memberi ruang bagi teks-teks baru, ilmu-ilmu baru, yang persis seperti yang dilakukan oleh para ulama madrasah generasi sebelumnya. Teks-teks tertentu dimasukkan ke dalam kurikulum madrasah bukan karena nilai religius intrinsiknya, melainkan karena teks-teks tersebut telah membantu membentuk dan mengasah kemampuan intelektual para siswa. Dengan kriteria ini, seharusnya tidak ada keberatan untuk terus mengevaluasi dan mengubah kurikulum madrasah untuk memberikan ruang bagi teks, teknik, dan ilmu pengetahuan baru yang paling sesuai dengan kebutuhan pedagogis dan intelektual secara efektif (Gilani & Younas, 2008). Inti dari gagasan Gilani adalah restrukturisasi radikal kurikulum madrasah pada madrasah yang radikal.

Usulan kurikulum Gilani tersebut ditulis oleh Sayyid Salman Nadwi. Dalam pengamatannya, Nadwi mengungkapkan bahwa komunitas Muslim sangat menderita karena terbagi menjadi dua kelompok yang sangat tidak setara, yaitu kelompok kecil yang mewakili kehidupan beragama dan kelompok mayoritas yang terdiri dari mereka yang dibesarkan dalam pendidikan non-agama. Merespon hal ini, Nadwi dengan lembaga Nadwat al-`Ulama-nya berhasil memperbaiki kesenjangan antara pembelajaran sekuler dan agama, terlebih pasca peristiwa 9/11. Pasca peristiwa 9/11 menjadikan madrasah-madrasah Muslim menjadi tertuduh, sehingga dalam pandangan Zahid al-Rashidi (Zaman, 2012b, p. 167) tidak cukup dengan memperbaiki kesenjangan antara pembelajaran sekuler dan agama, namun juga upaya untuk hidup bersama. Sebab, norma-norma Islam dan identitas Muslim menjadi sasaran atas nama globalisasi dan hak asasi manusia, sehingga membangun benteng dalam bentuk pendidikan, dakwah, reformasi dan kebangkitan intelektual sangat diperlukan. Hasil dari itu semua diungkapkan oleh Zaman sebagai jembatan antara dua tradisi (Integrasi keilmuan).

Dualitas tradisi intelektual dalam masyarakat Muslim modern selayaknya dijembatani dalam konteks yang berbeda-beda di berbagai kawasan yaitu Mesir di Timur Tengah dan India-Pakistan di Asia Selatan. Universitas Al-Azhar merupakan corak integrasi keilmuan di Mesir (Gubara, 2014, pp. 1–5) dan Deobandi di India (Ullah & Uddin, 2019).

Ada beberapa cara dalam integrasi keilmuan dalam pandangan Zaman (Zaman, 2012b, p. 168), yaitu: (a) mendekatkan bentuk pengetahuan keagamaan dan sekuler, (b) mengintegrasikan aliran keagamaan dan sekuler, (c) memperkenalkan umat Islam yang berpendidikan Perguruan Tinggi dan universitas pada aspek-aspek tradisi keilmuan Islam dan lulusan madrasah terhadap bentuk-bentuk pengetahuan modern. Dialog tentang wacana yang menjembatani pembelajaran agama dan sekuler ditempuh dengan cara yang berbeda-beda di kalangan intelektual Muslim tergantung pada sudut pandang mereka, orientasi sektarian, politik, dan intelektual, sehingga ada yang berpola analisis dikotomi dan analisis integrasi. Hal ini terlihat pada dialog antara Muhsin al-Mulk dan Rashid Ridha mengenai reformasi pendidikan yang tidak bisa lepas dari politik. Sedangkan dalam konteks berbeda, Ridha dan Qardawi membayangkan sebuah tatanan agama-politik Islam dan menjembatani atau meruntuhkan kesenjangan antara agama dan sekuler merupakan sarana munculnya elit baru yang menggiringnya.

Pendidikan Islam dalam pandangan Gilani merupakan sarana penting untuk melestarikan identitas Muslim dengan mengintegrasikannya dengan disiplin ilmu yang modern dan sekuler. Dalam hal ini terdapat analogi parsial dengan konsepsi minimalis Gilani tentang pendidikan Islam dalam pandangannya bahwa Al-Qur'an tidak boleh dianggap memuat "segala sesuatu". Perspektif ini sangat bertolak belakang dengan pandangan banyak Islamis, termasuk Sayyid Abu'l-A'la Mawdudi dari Pakistan (Gasimov, 2017), Harun Nasution (Nasution, 1982), Azyumardi Azra (Azra, 2017, 2019) dan Amin Abdullah (Abdullah, 2006) dari Indonesia, yang menyatakan bahwa umat Islam harus menjadikan Al-Qur'an sebagai titik awal semua pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan alam. Pandangan Gilani juga sangat kontras dengan keyakinan Rashid Ridha bahwa ajaran teks-teks dasar Islam dapat diperluas, melalui penalaran analogis ke semua aspek kehidupan.

Kesimpulan

Berdasarkan dialog reformis pemikiran dan praktik pendidikan Islam di Timur Tengah dan Asia Selatan menunjukkan bahwa: (a) Ada kesepakatan yang luas dan berkembang di kalangan ulama terkemuka serta antara ulama dan intelektual agama lainnya bahwa menjembatani kesenjangan antara tradisi intelektual yang berbeda adalah hal yang diinginkan dan sangat penting. Akan tetapi hingga saat ini belum tampak kesamaan persepsi mengenai alasan mengapa upaya integrasi tersebut layak dilakukan. (b) tradisi keilmuan dan kritik internal tetap dibutuhkan sebagai upaya konstruksi

integrasi keilmuan dalam praktik pendidikan Islam. (c) Ulama dan dogma Agamanya mesti diperbaharui dari tradisional ke modernis sehingga bisa memposisikan dirinya pada kontestasi politik.

Referensi

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic studies di Perguruan Tinggi: pendekatan integratif-interkoneksi*. Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. A. (2014). Religion, science and culture: An integrated, interconnected paradigm of science. *Al-Jami'ah*, 52(1), 175–203. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203>
- Abou El Fadl, K. (2004). *Islam and the Challenge of Democracy: A "Boston Review" Book*. Princeton University Press.
- Aḥmad, A. (1967). Islamic modernism in India and Pakistan, 1857-1964. (*No Title*).
- Ahram, A. I., Köllner, P., & Sil, R. (2018). Comparative area studies: Methodological rationales and cross-regional applications. In *Comparative Area Studies: Methodological Rationales and Cross-Regional Applications*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190846374.001.0001>
- Akbar, A. (2020). Fazlur Rahman's Influence on Contemporary Islamic Thought. *Muslim World*. <https://doi.org/10.1111/muwo.12334>
- Akyol, M. (2021). *Reopening Muslim Minds: A Return to Reason, Freedom, and Tolerance*. St. Martin's Publishing.
- Al-Attas, S. M. N. (1980). The Concept of Islamic Education. *The Keynote Address Delivered at the First World Conference on Muslim Education*, 16.
- Al-Azmeh, A. (2009). *Islams and modernities*. Verso Books.
- Al-Rodhan, N. R. F. (2012). *The role of the Arab-Islamic world in the rise of the west: Implications for contemporary trans-cultural relations*. Springer.
- Aldis, A., & Herd, G. P. (2006). The ideological war on terror: Worldwide strategies for counter-terrorism. In *The Ideological War on Terror: Worldwide Strategies for Counter-Terrorism*. <https://doi.org/10.4324/9780203968420>
- Allawi, A. A. (2009). *Crisis of Islamic civilization*. Yale University Press.
- Aydin, C. (2017). *The idea of the Muslim world: A global intellectual history*. Harvard University Press.
- Azra, A. (2017). *Surau: Pendidikan Islam Tradisi dalam Transisi dan Modernisasi*. Kencana.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Prenada Media.
- Banchoff, T., & Wuthnow, R. (2011). *Religion and the global politics of human rights*. Oxford University Press.
- Berger, M. S. (2005). How Successful Is Democratisation. *Middle East*.
- Bowering, G., Crone, P., Kadi, W., Stewart, D. J., Zaman, M. Q., & Mirza, M. (2012). *The Princeton encyclopedia of Islamic political thought*. Princeton University Press.

- Brachman, J. M. (2008). *Global jihadism: Theory and practice*. Routledge.
- Bruce, S. (1996). *Religion in the modern world: From cathedrals to cults*. Oxford University Press.
- Catalano, T., & Waugh, L. R. (2020). Introduction to Critical Discourse Analysis (CDA), Critical Discourse Studies (CDS), and Beyond. In *Perspectives in Pragmatics, Philosophy and Psychology*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49379-0_1
- Euben, R. L., & Zaman, M. Q. (2011). *Princeton Readings in Islamist Thought: Texts and Contexts from al-Banna to Bin Laden*. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- Gasimov, P. (2017). *Sayyid Abul A'la Mawdudi's political movement in thought and practice*. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Gilani, M. S. M. A., & Younas, M. (2008). Outlines of a Unified Educational System for Muslims. *Islamic Studies*, 47(3), 367–378.
- Gubara, D. E.-T. M. (2014). *Al-Azhar and the orders of knowledge*. Columbia University.
- Hallaq, W. (2019). *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha*. Columbia University Press.
- Hefner, R. W., & Zaman, M. Q. (2010). *Schooling Islam: The culture and politics of modern Muslim education*. Princeton University Press.
- Hourani, A. (1983). *Arabic thought in the liberal age 1798-1939*. Cambridge University Press.
- Iqbal, M. (2011). *The reconstruction of religious thought in Islam*. Iqbal Academy Pakistan.
- Juergensmeyer, M. (2005). *Religion in global civil society*. Oxford University Press.
- Kepel, G. (2002). *Jihad: The trail of political Islam*. Harvard University Press.
- Kerr, M. H. (1966). *Islamic reform: The political and legal theories of Muhammad'Abdub and Rashid Rida*.
- Khan, M. I. (2012). Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a. *Politics, Religion & Ideology*, 13(3), 420–422. <https://doi.org/10.1080/21567689.2012.704299>
- Khosrokhavar, F. (2015). *Inside jihadism: understanding jihadi movements worldwide*. Routledge.
- Kuhn, T. (2020). The structure of scientific revolutions. In *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective: Vol. II* (Issue 2). <https://doi.org/10.5840/philstudies196413082>
- McCants, W. F. (2015). *The ISIS apocalypse: The history, strategy, and doomsday vision of the Islamic State*. Macmillan.
- Moaddel, M. (2005). *Islamic Modernism, Nationalism, and Fundamentalism: Episode and Discourse*. The University of Chicago Press.
- Moosa, E. (2015). Book review; *Modern Islamic Thought in a Radical Age* by Muhammad Qasim Zaman. *Journal of the American Academy of Religion*, 7, 1–4.
- Nasr, S. H. (2009). *The heart of Islam: Enduring values for humanity*. Zondervan.
- Nasr, S. H. (2010). *Islam in the modern world: Challenged by the west, threatened by fundamentalism, keeping faith with tradition*. HarperOne.
- Nasution, H. (1982). *Pembaharuan dalam Islam: sejarah pemikiran dan gerakan*.
- Nawaz, M. (2012). *Radical: My journey from Islamist extremism to a democratic awakening*.

books.google.com.

- Rahman, F. (1982). *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. The University of Chicago Press.
- Said, E. W. (2012). *Culture and imperialism*. Vintage.
- SAIF, M. (2015). The Subject of Education and Edification: Manazir Ahsan Gilani's Proposal for a Unified System of Muslim Education in British India¹. *Islamic Studies*, 54(3–4), 169.
- Sutton, W. J. (1983). *The New Age Movement and the Illuminati 666*. Institute of Religious Knowledge.
- Tibi, B. (2014). *Political Islam, world politics and Europe: From jihadist to institutional Islamism*. Routledge.
- Turner, B. S. (2011). *Religion and modern society: Citizenship, secularisation and the state*. Cambridge University Press.
- Ullah, I., & Uddin, S. (2019). Traditionalist Trends in Pakistan's Ideology Critiquing Deobandis, Tablighi Jamā't and the Taliban. *Pakistan Study Centre*, 10(2), 204–223.
- Voll, J. (2014). Modern Islamic Thought in a Radical Age by Muhammad Qasim Zaman (review). *The Middle East Journal*, 68, 488–490.
- Zaman, M. Q. (1997). *Religion and politics under the early 'Abbasids: the emergence of the proto-Sunni elite* (Vol. 16). Brill.
- Zaman, M. Q. (2010). *The ulama in contemporary Islam: custodians of change*. Princeton University Press.
- Zaman, M. Q. (2012a). *Asbrat Ali Thanawi: Islam in Modern South Asia*. Simon and Schuster.
- Zaman, M. Q. (2012b). Modern Islamic thought in a radical age: Religious authority and internal criticism. In *Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973062>
- Zaman, M. Q. (2018). *Islam in Pakistan: A history* (Vol. 88). Princeton University Press.